

L A P O R A N
PENELITIAN



Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hki)
Dalam Sistem Hukum Nasional

Disusun oleh:

Ketua Tim	: TEMMY WIJAYA, M.H.	NIDN. 2127117001
Anggota	: DIKY ZEHRU ZAIN	NIM. 1842100013
Anggota	: KHAIRUL ANAM	NIM. 1842100005

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo
Tahun 2021



YAYASAN NURUL JADID PAITON

**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: NJ-T06/LP3M/0027/A.1/03.2021

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN : 2123098702
Jabatan : Kepala LP3M
Nama PT : Universitas Nurul Jadid
Alamat PT : PO BOX 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291

Menerangkan bahwa

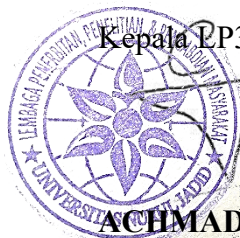
N a m a : TEMMY WIJAYA, M.H.
NIDN : 2127117001
Jabatan : Dosen Tetap Universitas Nurul Jadid
Prodi : Hukum
Fakultas : Sosial dan Humaniora

Diberi tanggung jawab bersama mahasiswa sebagaimana terlampir untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Sistem Hukum Nasional”** pada tanggal 15 Maret s.d. 30 Desember 2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Paiton, 15 Maret 2021



Kepala LP3M,

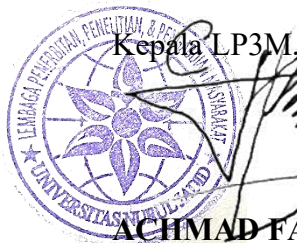
ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 212309870

Lampiran Nomor: NJ-T06/LP3M/0027/A.1/03.2021

Daftar Anggota Pelaksana Penelitian
Universitas Nurul Jadid Tahun 2021

NO	NIDN/NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN
1	2127117001	TEMMY WIJAYA,M.H	Sosial dan Humaniora	Hukum
2	1842100013	DIKY ZEHRU ZAIN	Sosial dan Humaniora	Hukum
3	1842100005	KHAIRUL ANAM	Sosial dan Humaniora	Hukum

Paiton, 15 Maret 2021



Kepala LP3M,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 21230987

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul	:	Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Sistem Hukum Nasional
2	Ketua Tim	:	TEMMY WIJAYA, M.H.
	a. NIDN	:	2127117001
	b. Program Studi	:	Hukum
	c. Alamat Email	:	
3	Anggota 1	:	DIKY ZEHRU ZAIN
	a. NIDN / NIM	:	1842100013
	b. Program Studi	:	Hukum
4	Anggota 2	:	KHAIRUL ANAM
	a. NIDN / NIM	:	1842100005
	b. Program Studi	:	Hukum
5	Lokasi Mitra (jika ada)	:	
	a. Kabupaten	:	
	b. Provinsi	:	
6	Luaran yang Dihasilkan	:	a. Jurnal Penelitian
			b.
			c.

Probolinggo, 25 Desember 2021

Mengetahui,
Kepala LP3M,

Ketua Tim,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

TEMMY WIJAYA, M.H.
NIDN. 2127117001

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Sistem Hukum Nasional

Abstrak. Artikel ini mengkaji tentang hak kekayaan intelektual secara hukum. Bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual dalam system hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, HKI telah memiliki payung hukum yang kuat sebagai bentuk pengakuan Negara dan pemerintah terhadap kreativitas anak bangsa. Perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi HKI di Indonesia ialah UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Hak Merk. Sedangkan perlindungan varientas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000, Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 dan Desain industry di atur dalam UU No. 31 tahun 2000.

Katakunci: Kedudukan, HKI, dan Hukum Nasional

Abstract. Abstract must be written in Indonesian and English. Abstract contains at least 1) Research objectives; 2) Research methods; 3) Results and discussion; and 4) Conclusion. Before the research objectives, it is also permissible to include the background and research problems in one sentence. After the conclusion, it is also possible to include recommendations of the results of the study. Abstract contains 250 - 300 words.

Keywords: Keywords represent key concepts in the article, a minimum of three keywords and a maximum of five keywords, arranged in alphabetical order, written in *italics*, separated by a semicolon (;), for example, *Culture; Demographics; Ethics; Religion; Weather.*

BAB I

PENDAHULUAN

Istilah Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak yang timbul karena hasil kreasi intelektualitas seseorang. Hal kreasi intelektualitas ini memiliki nilai ekonomi, sehingga mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Memiliki nilai ekonomi karena produk intelektualitas memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Inovasi dan hasil kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Dengan inovasi yang mendapatkan perlindungan hukum penemu akan mendapatkan keuntungan apabila dimanfaatkan.

Keuntungan yang dapat diperoleh hasil kreasi dan inovasi atau karya intelektual seperti buku, sastra, seni musik dan lain-lain secara ekonomis akan mendapatkan berupa pembayaran royalty dan technical fee. Melalui imbalan ataupun pengakuan kreasi, karya, karsa dan cipta manusia di dalam peraturan HKI, di harapkan bisa menjadi sarana membangkitkan motivasi dan semangat minat untuk mendorong lahirnya ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.

Wujud pengakuan dan perlindungan negara terhadap hasil karya para intelektual ialah lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI, walaupun secara historis lahirnya undang-undang itu sebagai konsekuensi logis karena Indonesia sebagai anggota Internasional TRIP's (agreement on trade related aspects of intellectual property rights) yang sudah diakomodir dalam UU.No.14 Tahun 2001 bahwa hasil karya dan pemikiran para intelektual adalah harta kekayaan

Oleh karena itu menurut Mushafi, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (legal approach) tetapi juga teknologi dan bisnis (business and technological approach) dan sistem perlindungan yang baik terhadap HKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

Wujud pengakuan dan perlindungan negara terhadap hasil karya para intelektual ialah lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI, walaupun secara historis lahirnya undang-undang itu sebagai konsekwensi logis karena Indonesia sebagai anggota Internasional TRIP's (agreement on trade related aspects of intellectual property rights) yang sudah diakomodir dalam UU.No.14 Tahun 2001 bahwa hasil karya dan pemikiran para intelektual adalah harta kekayaan Oleh karena itu menurut Mushafi, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (legal approach) tetapi juga teknologi dan bisnis (business and technological approach) dan sistem perlindungan yang baik terhadap HKI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem tersebut.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN HKI

Secara defenitif HKI dapat dipahami sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI di kategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adany pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat di nikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.

HKI sendiri mmenurut David Bainbridge dikatakan “thant area of law which concerns legal rights associated with creative ef- fort or commercial reputation and goodwill”. Konsepsi yang di kemukakan oleh david ini nampaknya sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah HKI pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum, terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intellectual.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hakatas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda imateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak bukanlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini juga disebut sebagai fugsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistic dan mampu memproses informasi secara stimulan.

Demikian hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam biidang tekknologi juga dirumuskan sebagai hakatas kekayaan intelektual. Kemampuan untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan bberbagai faktamenghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan dari belahan otak kiri.

Hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kategori, salah satu diantara kategori itu pengelompokan benda kedalam klasiifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud.

2. Klasifikasi HKI

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual dapat di kategorikan kedalam 2 kelompok sebagai berikut:

- a. Hak cipta (copy rights). Hak cipta sebenarnya dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu: hak cipta dan hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (neighbouring rights).
- b. Hak milik, perindustrian (industrial property rights). Hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:10
- c. Patent (paten)
- d. Utility models (model dan rancang bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah paten sederhana (simple patent);
- e. Industrial design (desain industri). Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- f. Trade merk (merek dagang). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹² Contoh : Kecap Cap Bangau;
- g. Trade name (nama niaga atau nama dagang).
- h. Indication of source or application of origin (sumber tanda atau sebutan asal).
- i. WTO dalam kesepakatan TRIPS menambahkan 2 macam hak atas, yaitu :
 - a) Perlindungan varietas (varieties of plants protection). Adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. (didaftarkan ke Departemen Pertanian).
 - b) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit).¹⁴ Adalah kreasi berupa rancangan tata letak tiga dimensi dari suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalam terdapat berbagai elemen sekurang-kurangnya elemen aktif yang saling berkaitan dibentuk terpadu dalam bahan semikonduktor.

3. Kedudukan HKI Dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia

Saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan dibidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam persetujuan TRIPS.¹⁶ Adapun perangkat UU HAKI Indonesia, yakni:

- a. Hak cipta diatur dalam UU No 19 tahun 2002;
- b. Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001;
- c. Merek diatur dalam UU No. 15 tahun 2001;
- d. Perlindungan varietas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000;
- e. Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000;

- f. Desain industri di atur dalam UU No. 31 tahun 2000;
- g. tata letak sirkuit terpadu di atur dalam UU No. 32 tahun 2000

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang Indonesia telah meratifikasi 5 konvensi internasional dibidang hak kekayaan intelektual yakni sebagai berikut:

- a. Paris convention for the of industrial property dan convention establishing the world intellectual property organization (keputusan presiden No. 15 Tahun 1997, tentang perubahan atas keputusan presiden No. 24 tahun 1979);
- b. Patent cooperation treaty (PCT) and regulation under the PCT (keputusan persiden no 16 tahun 1997);
- c. Trademark law treaty (keputusn presiden No. 17 tahun 1997);
- d. Berne convention for the protection of literary and artisctic works (keputusan presiden no 18 tahun 1997);
- e. WIPO copyrights treaty (keputusan presiden No. 18 tahun 1997)

4. Hak Cipta

Hak cipta (copy right) adalah hak eksklusif bagi pencita atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁹ Yang antara lain dapat sterdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengann hak cipta. Rakaman suara dan/ atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer) misalnya sesorang penyanyi atau penari di atas pannggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, “ hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang tmbul secara otomatis berdasarkan prinsip eksklusif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Sedangkan ciptaan menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 2 tahun 2014 tentang hak cipta adalah “setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan oleh onspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, ketrampilan, dan kahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.”

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alas an apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah di alihkan.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasatkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan dapat dilihat, dibaca dan didengar.

5. Hak Paten

Dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang hak paten, mendefinisikan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁵ Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi.

Paten diberikan untuk jangka waktu terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut dalam jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, Pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya, supaya pada saat berakhirnya perlindungan hak paten, informasi yang berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

6. Hak Merek

Menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, mendefinisikan merek adalah tanda yang berupa huruf-huruf, angka, gambar-gambar, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁹ Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang didaftarkan dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni pemberian izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Secara umum, merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertitikad tidak baik. Pemohon yang bertitikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun

untuk membongceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain.

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Sejauh ini pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berjumlah 450 orang. Dibandingkan dengan yang ada di beberapa negara yang telah maju. Direktorat Jenderal HaKI merupakan institusi yang relatif masih muda/naru. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi seandainya dalam pelaksanaan tugasnya, masih dijumpai berbagai macam kendala. Walaupun demikian, melalui berbagai program pelatihan yang intensif telah ada beberapa staf yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai guna mendukung peningkatan sistem hak kekayaan intelektual sebagaimana diharapkan.

Perlu pula kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, sejak Januari 2000, pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan di Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Kantor-kantor Wilayah akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal HaKI untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu, pada saat ini, dengan bantuan World Bank sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem otomatisasi di Direktorat Jenderal HaKI yang diharapkan dapat lebih menunjang proses administrasi dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan lain-lain. Karya-karya intelektual ini dalam menghasilkan membutuhkan tenaga, waktu serta biaya sehingga HKI perlu dilindungi. HKI diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu hak cipta dan hak perindustrian. HKI memiliki sifat diantaranya adalah mempunyai jangka waktu terbatas, bersifat eksklusif dan mutlak, dan bersifat hak mutlak. Adapun perangkat peraturan perundang-undangann mengenai HKI yaitu: Hak cipta diatur dalam UU No 19 tahun 2002, hak Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001, hak Merek diatur dalam UU No. 15 tahun 2001, Perlindungan varientas baru tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000, Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 tahun 2000 dan Desain industry di atur dalam UU No. 31 tahun 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, 2004, Hak Kekayaan intelektual, suatu pengantar, Bandung : PT alumni
- Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), 2007.”kebijakan pemerintah dalam perlindungan HKI dan liberalisasi perdagangan jasa profesi dibidang hukum”,Jakarta :direktorat jendral industry kecil menengah departemen perindustrian 91
- Mastur, 2012. “perlindungan hukum hak dan kekayaan ntelektual dibidang paten”, jurnal ilmiah ilmu hokum QISTI, vol. 6 No. 1
- Miru, Ahmadi. 2005,Hukum merek: cara mudah mempelajari Undang-undang merek,Jakarta :PT Raja Grafindo Persada;
- MT, Mashoedah., 2015,pengenalan HKI (hak kekayaan intelektual), Yogyakarta : universitas negeri Yogyakarta
- Muljia, Kartini muljadi dan widjaja, gunawan., “seri hokum harta kekayaan : kebendaan pada umumnya”, Jakarta : kencana
- Mushafi, 2019. Aspek Hukum Dalam Kegiatan-Kegiatan Ekonomi, Probolinggo; Pustaka Nurja; Sofiani,Triana. 2014,”konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka system hukum koperasi nasional” Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember
- Riswandi, Budi agus dan M.Syamsudin. 2004.hak kekayaan intelektual dan budaya hukum, Jakarta : PT rajagrafindo persada
- Saidin, H,OK. 2006.. Aspek hukum kekayaan intelektual (intellectual property rights), Jakarta : PT Rajagrafindo persada
- Undang-undang HKI hak kekayaan intelektual, 2003 . Cet 1 jakarta : sinar grafika
- Wicaksono, Aji., 2015,“permasalahan klaim budaya terkait Hak kekayaan intelektual suatu bangsa”, NARADA, jurnal desain dan sni, FSDK-LMB, vol 2
- Yulianti, Devi. “Restruktisasi BUMN sebagai salah satu rangka reformasi untuk mengembangkan perusahaan”, Jurnal Sosiologi, Vol. 17, No. 2